

FORPASI

FORUM PEDULI SAMPAH SELURUH INDONESIA

REKOMENDASI TATA KELOLA UNTUK MENGATASI DARURAT SAMPAH DI INDONESIA

Tim Riset - Relawan FORPASI:

- Rendy Bayu Aditya
- Like Hana Purba
- Muhammad Khabib Cahyo Nugroho
- Hadohoan Satyalen Simaremare

Dokumen tertutup, tidak untuk disebarluaskan tanpa seijin pemilik - Hak Cipta Pendiri

AGENDA

1. PENGANTAR

1. RUMUSAN MASALAH
2. PROFIL TIM RISET

2. SIMPULAN RISET

1. RINGKASAN EKSEKUTIF
2. KERANGKA PIKIR dan METODE RISET
3. SIMPULAN WEBINAR FORPASI

3. SINTESA DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1.1 RUMUSAN MASALAH

1 TIDAK SEMUA MEMAHAMI BAHWA MENYELESAIKAN ISU SAMPAH MEMBAWA KEUNTUNGAN SECARA PERADABAN

- Tidak ada lagi **masalah sosial** khususnya perkotaan yang memiliki laju urbanisasi dan peningkatan penduduk: Peningkatan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat
- Faktor pendukung utama dalam salah satu potensi ekonomi Indonesia yaitu **ekonomi hijau** khususnya pariwisata berkelanjutan (komoditas ekspor)
- Sebagai **contoh bagi dunia** dalam penanggulangan sampah yang kompleks sehingga **meningkatkan daya tawar** di mata internasional

2 TERDAPAT POTENSI KEKELIRUAN DALAM MENYERAP ANGGARAN PERSAMPAHAN

CONTOH: TERLALU FOKUS KE TEKNOLOGI DAN PRAGMATIS MENCONTOH NEGARA LAIN TANPA MEMANDANG SECARA KOMPREHENSIF DARI 5 ASPEK

- **Pembiaran sistemik**, dan tidak ada yang mengomandani karena bukan prioritas politik nasional
- **APBN akan terkucur** banyak tanpa ada manfaat nyata, khusus bagian hulu, kurangnya penegakan regulasi dan juga edukasi
- Fokus teknologi memiliki **potensi penyelewengan** dan *CoE(Conflict of Interest)* yang tinggi dan treatment yang tidak seimbang dgn kondisi hulu

3 TIDAK ADA YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERBAKARNYA 38 TPA DARI JUNI-OKTOBER 2023

- **Semua pihak** sudah melanggar UU 18/2008, termasuk dalam hal ini eksekutif:(**pemerintah pusat dan daerah**) dan juga legislatif (pengawasan yang kurang dari **DPR dan DPRD**) dan atensi masyarakat sipil

4 TIDAK ADA NARASI POLITIS DI AWAL

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki implikasi sbb:

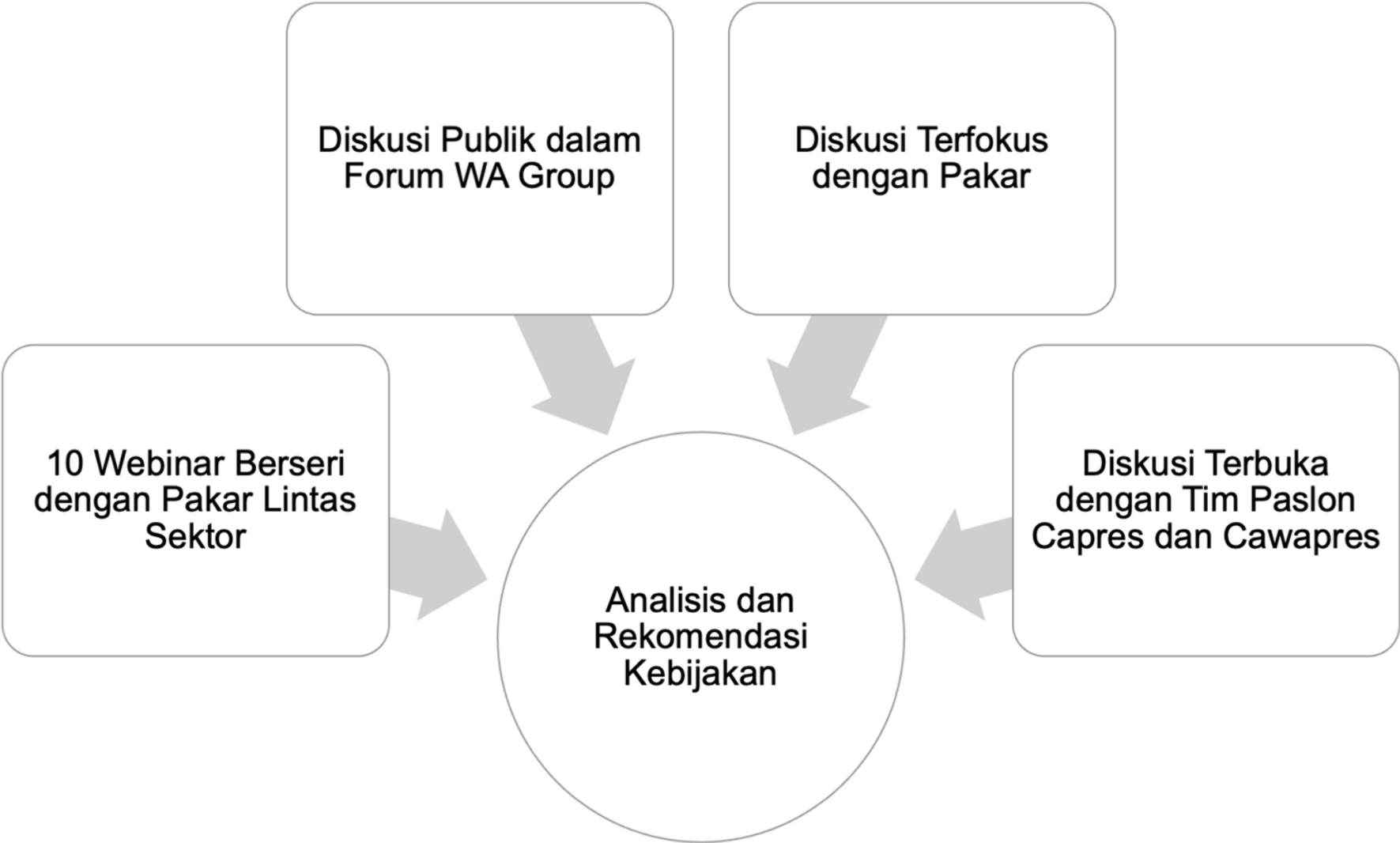
- *Lingkungan hidup **anak tiri**, sampah **lebih anak tiri***
- **Kecilnya anggaran**
- **Belum ada fokus penyelesaian masalah**

2.1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Masalah sampah telah menjadi **isu nasional** yang sangat krusial dan memerlukan penyelesaian segera, terlihat dari terbakarnya **38 TPA** dalam waktu dekat ini. Budaya "nyampah" di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak negatif di berbagai sektor. Pihak berwenang telah merumuskan serangkaian solusi, tetapi **penegakan regulasi** menjadi tantangan yang besar. Berbagai kelompok masyarakat, komunitas, dan swasta telah melakukan **berbagai upaya penanganan sampah** demi kesehatan, kualitas lingkungan, dan juga kebermanfaatan ekonomi. Adapun **pemahaman mendasar** terkait pengelolaan sampah masih perlu dibenahi, sehingga terdapat **komitmen dan kolaborasi** dari berbagai pihak untuk memahami permasalahan secara **komprehensif** dan menyelesaikannya secara **masif**. Selain itu, **political will / keberpihakan politik** diperlukan dalam mengatasi permasalahan sampah **secara nasional** sebagai faktor pendorong untuk **kelima aspek pengelolaan sampah**.

Sampah harus menjadi **prioritas politik** dalam pembangunan **nasional dan daerah** yang termanifestasi dalam penguatan hukum, partisipasi publik, dan alokasi anggaran berkelanjutan. **Koordinasi antar lembaga** baik di tingkat pusat maupun daerah perlu diperkuat dan dipercepat, salah satunya melalui **pembentukan badan penanggulangan dan penetapan kondisi darurat sampah**. Penerapan **teknologi** yang tepat guna yang didukung oleh penilaian dampak yang teliti serta pengembangan riset dan teknologi yang kolaboratif diperlukan. **Kerjasama multisektor**, yaitu antara pemerintah, peran optimal produsen dan sektor komersial, kelompok masyarakat, mendukung keberlanjutan sektor persampahan. **Dukungan informasi** melalui internalisasi pengetahuan persampahan dalam pendidikan di beragam jenjang dan kolaborasi kanal-kanal informasi (media dan sosial media) ikut memperkuat **upaya perubahan perilaku** komponen pemangku kepentingan.

2.2. KERANGKA BERPIKIR



2.2. METODE RISET

Metode riset yang digunakan adalah metode **analisis konten** (*content analysis*). Analisis konten dipilih karena memungkinkan adanya observasi informasi yang fleksibel berdasarkan sumber-sumber yang beragam. Berikut adalah langkah-langkahnya



1. **Pengumpulan Data:** Sumber-sumber data tersebut melibatkan diskusi dengan para pakar dalam rangkaian 10 webinar berseri maupun diskusi dengan pakar yang tidak terdokumentasi dalam rangkaian seminar, diskusi informal yang terjadi di dalam grup WA FORPASI, diskusi publik, serta informasi dari literatur ilmiah maupun literatur abu-abu (*grey literature*) seperti media, reportase fakta dan data, hingga sosial media.

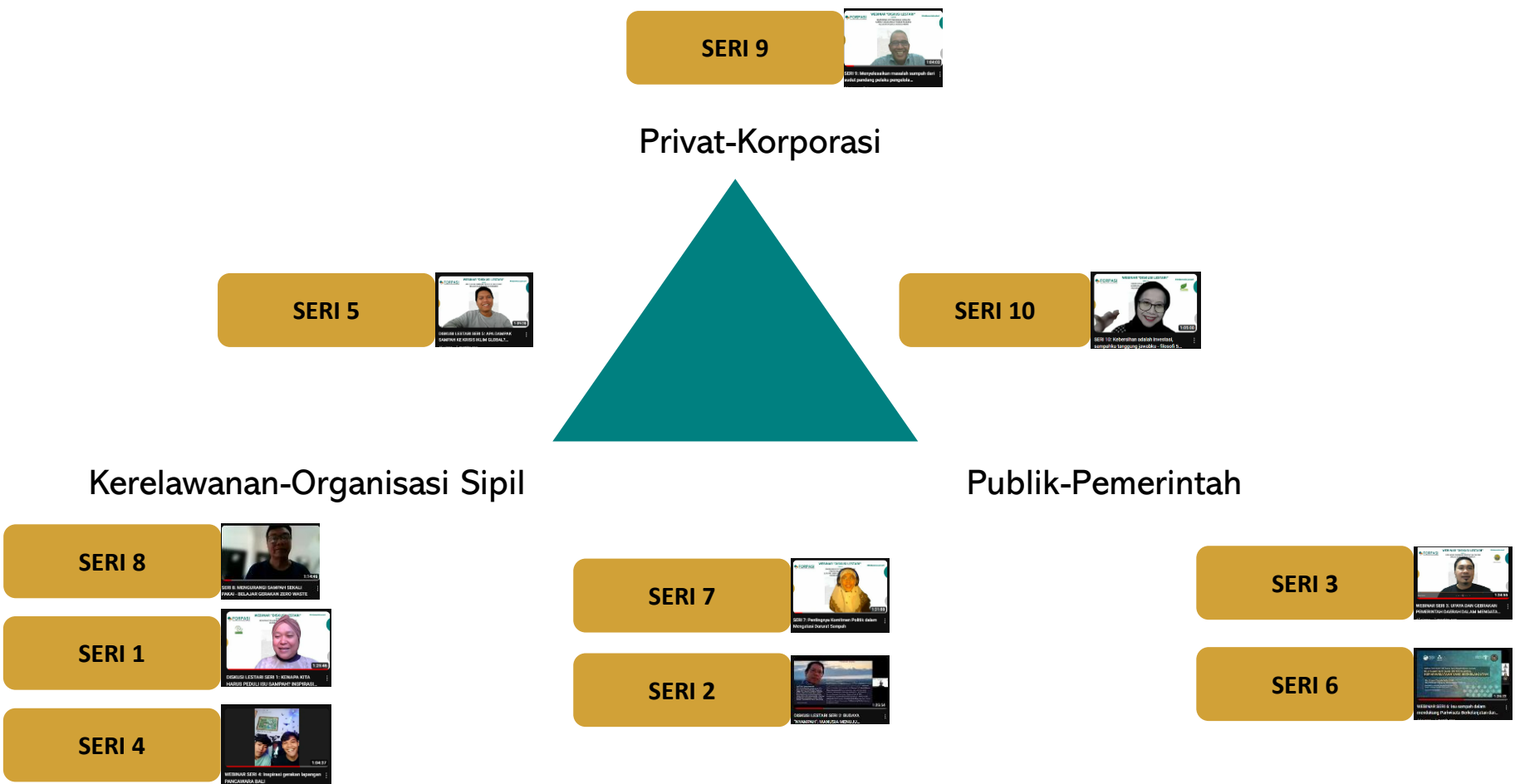


2. **Analisis Data:** Protokol *coding* yang dilakukan adalah campuran antara induktif dan deduktif. *Coding* induktif adalah perumusan tema berdasarkan pada temuan-temuan faktual dari data yang diperoleh. *Coding* deduktif adalah perumusan kode berdasarkan pada kerangka teori yang sudah ditentukan. Pada *coding* deduktif, dokumen ini mengacu pada 6 pilar perbaikan pengelolaan sampah yaitu politik, regulasi, pendanaan, teknologi, kelembagaan, dan sosial budaya.



3. **Interpretasi:** Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret. Tim mencari pola atau temuan signifikan dalam analisis yang dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif.

2.2 PENGUMPULAN DATA – SIMPULAN WEBINAR: FORPASI SUDAH MELAKSANAKAN 10 SERI WEBINAR DISKUSI LESTARI YANG DIRANCANG DENGAN KERANGKA PELIBATAN MULTI-SEKTOR



2.2 PENGUMPULAN DATA: DISKUSI DINAMIS DALAM GRUP WA FORPASI MENGHASILKAN BEBERAPA HAL KUNCI YANG PERHATIAN PUBLIK PADA ISU PERSAMPAHAN

KORUPSI + PENGAWASAN

Dugaan Korupsi Retribusi Sampah, Mantan Kepala DLH Balam Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,69 Miliar

Tayang: Senin, 27 Maret 2023 15:28 WIB

Penulis: Hurri Agusto | Editor: Teguh Prasetyo

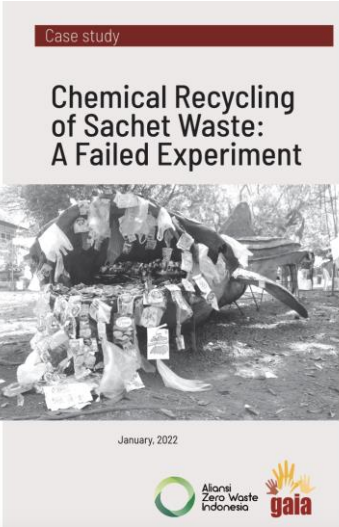


Kejari Cilegon geledah kantor DLH terkait dugaan korupsi retribusi sampah

© Kamis, 14 Desember 2023 21:14 WIB



PILIHAN TEKNOLOGI



KOMITMEN POLITIK

Komitmen Pemerintah Indonesia Tuntaskan Pencemaran Sampah Plastik



Penulis: POJSA PNAS Tanggal Terbit: 08 Agustus 2022

SIARAN PERS
KLHK Dampingi Pemerintah Daerah Tuntaskan Amanat Presiden Agar Indonesia Bersih Sampah 2025

23 Mei 2018, dibaca 19436 kali

SIARAN PERS
Nomor : SP. 273/HUMAS/PP/HMS.3/5/2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 23 Mei 2018. Target Indonesia Bersih Sampah 2025 melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 tidak bisa berhasil tanpa komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah.

KONFLIK KEPENTINGAN & INKONSISTENSI

Aktivis Serukan Akhiri Impor Sampah Plastik

Berita Nasional
KLHK Minta Masyarakat Tidak Membeli Produk dari Produsen yang Tidak Komitmen Terhadap EPR, Kenapa?

Tayang: Rabu, 7 Juni 2023 20:44 WIB

Editor: Panji Baskhara



2.3 SIMPULAN WEBINAR FORPASI DAN KAITAN DENGAN RUMUSAN MASALAH

SERI 1
Sektor Kerelawanan -
Organisasi Sipil: Direktur
PPLH Bali

SERI 2
Sektor Publik - Kerelawanan:
Asosiasi Antropologi
Indonesia

SERI 3
Sektor Publik - Pemerintah:
Kepala Desa & Penggagas
Program TPS3R Sayan

SERI 4
Sektor Kerelawanan -
Organisasi Sipil: Pancawara
Bali

SERI 5
Sektor Privat - Kerelawanan:
Founder Griya Luhu (Bank
Sampah Induk Digital)

DAFTAR SIMPULAN

Isu sampah yang dialami oleh Indonesia
Urgensi dalam mengatasi permasalahan sampah
Gerakan Zero Waste dari PPLH Bali
Fenomena budaya “Nyampah”
Latar belakang budaya masyarakat membuang sampah sembarangan
Upaya pengurangan sampah yang dapat dilakukan sehari-sehari
Pengembangan dan Pengelolaan TPS 3R Desa Sayan
Tantangan dalam pengembangan TPS 3R
Produk yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah di TPS 3R
Inspirasi Gerakan Pancawara Bali
Peran komunitas/LSM/NGO dalam meningkatkan kepedulian publik tentang isu sampah
Peran media sosial dalam kampanye lingkungan
Hubungan sampah dengan perubahan Iklim
Dampak gas metana terhadap perubahan iklim
Persebaran gas metana

RUMUSAN MASALAH

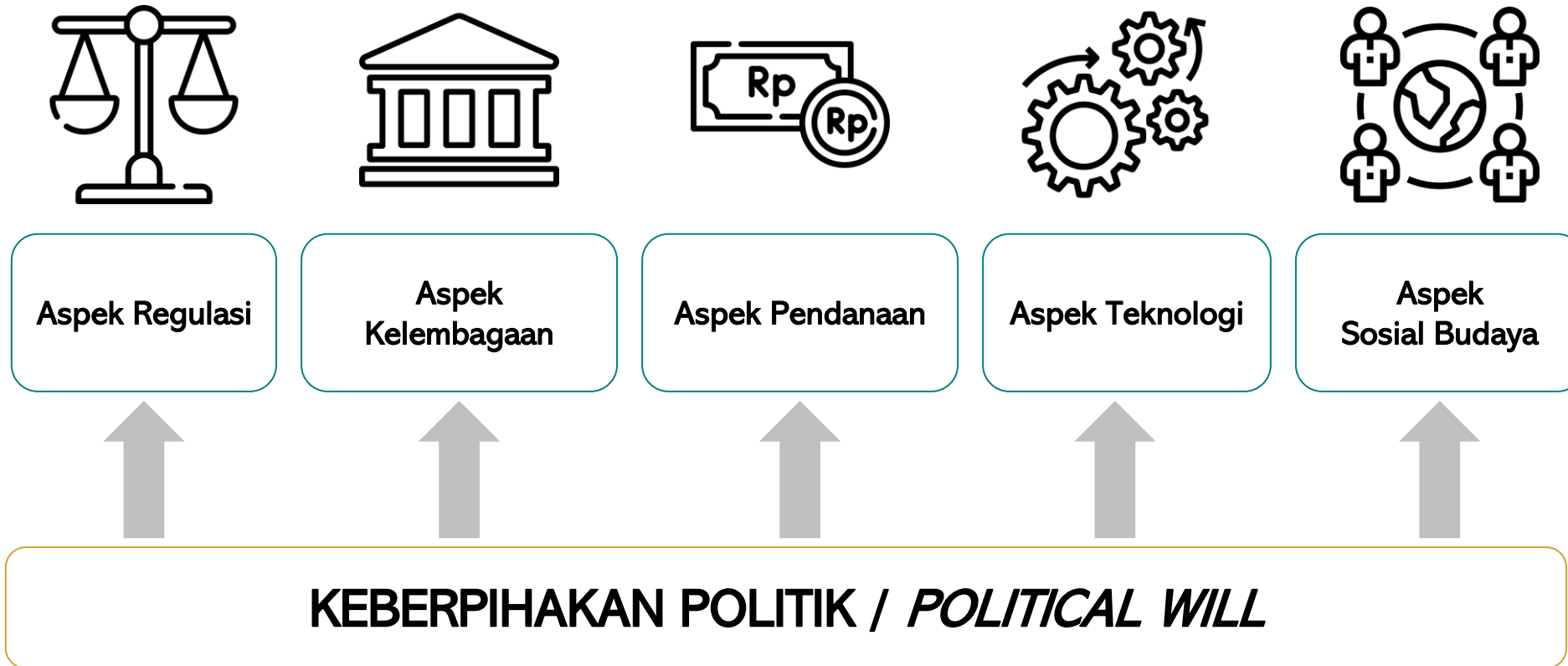
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4

2.3 SIMPULAN WEBINAR FORPASI DAN KAITAN DENGAN RUMUSAN MASALAH

	DAFTAR SIMPULAN	RUMUSAN MASALAH			
		1	2	3	4
SERI 6 Sektor Publik - Pemerintah: Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf	Sampah yang tidak dikelola di tempat wisata telah menjadi penyumbang masalah serius	1	2	3	4
	Lemahnya penegakan peraturan menjadi tantangan dalam menghadapi permasalahan sampah	1	2	3	4
	Kebijakan "Sustainable Tourism Development" menjadi bentuk komitmen bersama dalam menangani masalah sampah	1	2	3	4
SERI 7 Sektor Publik - Kerelawanan: Dosen Ilmu Sosial Politik Universitas Gadjah Mada	Penanganan isu sampah dinilai lamban karena pembentukan regulasi yang lama dan tidak efektif	1	2	3	4
	Hak dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan sampah berkaitan erat dengan political will	1	2	3	4
	Perlunya narasi politis <i>supply-demand</i> dalam penanganan masalah sampah	1	2	3	4
SERI 8 Sektor Kerelawanan - Organisasi Sipil: Gerakan Zero Waste	Dampak serius dari masalah sampah terhadap lingkungan, sumber daya alam, dan manusia	1	2	3	4
	Inisiatif dalam upaya pengurangan timbulan sampah plastik	1	2	3	4
	Pentingnya pemahaman hirarki pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat	1	2	3	4
SERI 9 Sektor Privat-Korporasi: PT. Sumber Organik	Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan sampah	1	2	3	4
	Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi timbulan sampah organik	1	2	3	4
	Pengolahan sampah organik di TPA Benowo menjadi energi listrik	1	2	3	4
SERI 10 Sektor Privat-Publik: Pakar InSWA	Pentingnya perubahan pola pikir dalam penanganan masalah sampah	1	2	3	4
	5 aspek dalam pengelolaan sampah dan dukungan <i>political wil</i>	1	2	3	4
	Identifikasi permasalahan dari setiap aspek pengelolaan sampah	1	2	3	4

3. DALAM MENYIMPULKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN, KAMI BERANGKAT DARI 5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENTINGNYA KEBERPIHAKAN POLITIK

5 ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH



Pengembang Konsep:
Ibu Sri Bebarsari -
(Pakar Persampahan
Indonesia selama
lebih dari 40 tahun)
dan Tim InSWA
(Indonesian Solid
Waste Association)*

**Referensi: Buku Kebersihan Adalah Investasi, Sampahku Tanggungjawabku (InSWA)*

3. REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

POLITIK

- Sampah sebagai **prioritas politik** dan agenda pembangunan **nasional dan daerah**.
- Memprioritaskan keberlanjutan agenda persampahan **di atas dinamika politik** dan **suksesi kepemimpinan**.
- **Melihat agenda persampahan** sebagai upaya kolektif mencapai **kesehatan publik** dan **mitigasi iklim**

REGULASI

- Penguatan **penegakan hukum** kegiatan persampahan baik di tingkat **nasional maupun daerah**
- Pengembangan **regulasi yang terstruktur** dari nasional hingga level komunitas
- Peran **partisipasi publik** dalam penyusunan regulasi

PENDANAAN

- Prioritas **alokasi anggaran** serta pengetatan **pengawasan dan evaluasi** anggaran yang berlanjut
- **Diversifikasi sumber pendanaan** sektor persampahan dan **optimalisasi** sumber pendanaan yang ada
- **Memastikan pendanaan yang berkelanjutan** dan stabil, berkeadilan, transparansi, dan akuntabilitas

KELEMBAGAAN

- Pembentukan **badan khusus** penanggulangan sampah dan **penetapan kondisi darurat** sampah di tingkat nasional dan daerah
- **Peningkatan Kerjasama** Pemerintah, Swasta, Lembaga Riset, dan Kelompok Masyarakat
- Optimalisasi **peran produsen** dalam upaya pengurangan sampah

TEKNOLOGI

- Mendukung **pengembangan riset dan teknologi** pengelolaan sampah
- Melakukan **identifikasi dampak multidimensi** dalam proses pengambilan keputusan teknologi
- Program **edukasi, pelatihan, serta kolaborasi** pemanfaatan teknologi persampahan

SOSIAL BUDAYA

- **Internalisasi pengetahuan dan kesadaran** pentingnya pengelolaan sampah di berbagai jenjang
- Penguatan infrastruktur dan **mekanisme partisipasi masyarakat** dalam pengelolaan sampah
- Perkuat **kemitraan dan kolaborasi** kanal-kanal informasi (**media & sosial media**)

5 ASPEK PERSAMPAHAN



Terima Kasih